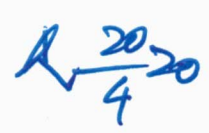


No. Agenda : 846		Tanggal : 15 April 2026		Sifat : ☐ Biasa ☐ Rahasia ☐ Segera	
Asal : Sekretaris Inspektorat Jenderal					
Nomor : 590/IJ-IND.1/PR/IV/2026					
Isi Ringkas : Laporan PP39 Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2026					
Lampiran :					
<u>Diteruskan kepada:</u> ☒ Sesitjen ☐ Inspektur I ☐ Inspektur II ☐ Inspektur III ☐ Inspektur IV ☐ Inspektur Investigasi			<u>ISI DISPOSISI</u> 		
<u>Catatan:</u> ☐ Dipelajari ☐ Diketahui/diperhatikan ☐ Dimonitor pelaksanaannya ☐ Disiapkan konsep ☐ Dibicarakan dengan Irjen ☐ Sirkulasi ☐ Database ☐ Diteruskan ke ☐ File ☐ Selesaikan ☐ Dibahas dengan ☐ Mohon tanggapan ☐ Tim..... ☐ Diteliti kemudian laporkan					
Diterima tanggal:.....No.Agenda:.....			Disposisi Kabag/Kabid/Kasubdit		
Diteruskan kepada: Kepada : Tanggal:					
Diterima tanggal:.....No.Agenda:.....			Disposisi Kabag/Kabid/Kasubdit		
Diteruskan kepada: Kepada : Tanggal:					

NOTA DINAS
NOMOR 530/IJ-IND.1/PR/IV/2026

Yth : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan PP39 Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 April 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami laporkan bahwa capaian realisasi penyerapan anggaran Pagu pada Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan I tahun 2026, yaitu Rp12.602.775.092,- atau sebesar 30,00% dari pagu anggaran Rp42.005.662.000,-.

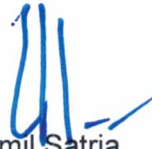
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada Triwulan I (Januari-Maret) adalah sebagai berikut:

1. Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan /BMN pada BDI Padang, BDI Medan, PTKI Medan, AKA Bogor, STTT Bandung, Petrokimia Banten, Politeknik APP Jakarta, Politeknik STMI Jakarta, dan BDI Jakarta;
2. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) Bandung TA 2025;
3. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2026;
4. Penilaian SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal;
5. Persiapan Penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian;

6. Pelaksanaan Evaluasi Internal Audit Capability Model (IACM) Tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektur Jenderal,



Emil Satria

Tembusan:

1. Para Inspektur;
2. Kepala Bagian Umum.

NOTA DINAS
NOMOR **91** /IJ-IND/PR/IV/2026

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Plt. Inspektur Jenderal
Hal : Laporan PP39 Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : **13** April 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami laporkan bahwa capaian realisasi penyerapan anggaran Pagu pada Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan I tahun 2026, yaitu Rp12.602.775.092,- atau sebesar 30,00% dari pagu anggaran Rp42.005.662.000,-.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada Triwulan I (Januari-Maret) adalah sebagai berikut:

1. Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan /BMN pada BDI Padang, BDI Medan, PTKI Medan, AKA Bogor, STTT Bandung, Petrokimia Banten, Politeknik APP Jakarta, Politeknik STMI Jakarta, dan BDI Jakarta;
2. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) Bandung TA 2025;
3. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2026;
4. Penilaian SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal;
5. Persiapan Penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian;
6. Pelaksanaan Evaluasi Internal Audit Capability Model (IACM) Tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

As Pit. INSPEKTUR JENDERAL, 

Tembusan:

M RUM

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Inspektur.

LAPORAN PP39

TRIWULAN I 2026



INSPEKTORAT
JENDERAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan I Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan tujuan untuk melihat realisasi fisik dan anggaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian periode triwulan I tahun 2026.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, April 2026

13 Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



M. RUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal.....	1
1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program.....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	11
2.1 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026	11
2.2 Sasaran Program Tahun Anggaran 2026.....	14
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	18
3.1 Hasil yang Telah Dicapai.....	18
3.2 Analisa Capaian Kinerja	21
3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	44
2.4 Langkah Tindak Lanjut.....	44
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal	3
Tabel 2. 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal.....	11
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	14
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026	14
Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pagu Efektif.....	19
Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Inspektorat Jenderal	20
Tabel 3. 3 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal	20
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Output Inspektorat Jenderal Tahun 2026	21
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal.....	22
Tabel 3. 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026	26
Tabel 3. 7 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I Tahun 2026	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Inspektorat Jenderal.....	2
Gambar 1. 2 Bagan Organisasi Inspektorat I	5
Gambar 1. 3 Bagan Organisasi Inspektorat II	6
Gambar 1. 4 Bagan Organisasi Inspektorat III	7
Gambar 1. 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2026 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

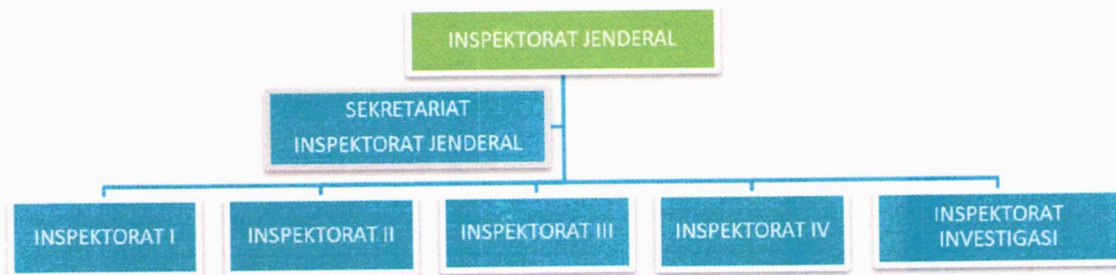
1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III;
- Inspektorat IV; dan
- Inspektorat Investigasi

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksana evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;

- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
1	Kepala Bagian Umum	1	PNS
2	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	2	PNS
3	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	2	PPPK
4	Fungsional Arsiparis Terampil	3	PNS & PPPK
5	Fungsional Analis SDMA Ahli Madya	1	PNS
6	Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama	2	PPPK
7	Fungsional Auditor Ahli Madya	1	PNS
8	Fungsional Auditor Ahli Pertama	2	PNS
9	Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda	1	PNS

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
10	Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama	1	PNS
11	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	PNS
12	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	PNS
13	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	2	PNS
14	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	PNS
15	Fungsional Perencana Ahli Pertama	4	PNS & PPPK
16	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	2	PPPK
17	Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama	2	PPPK
18	Penelaah Teknis Kebijakan	2	PNS
19	Penata Layanan Operasional	3	PNS
20	Pengelola Layanan Operasional	6	PNS
21	Operator Layanan Operasional	3	PPPK
22	Pengadministrasi Perkantoran	3	PPPK
23	Dokumentalis Hukum	1	PNS
24	PPNPN	5	
Total Pegawai Sekretariat Itjen		52 orang	

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

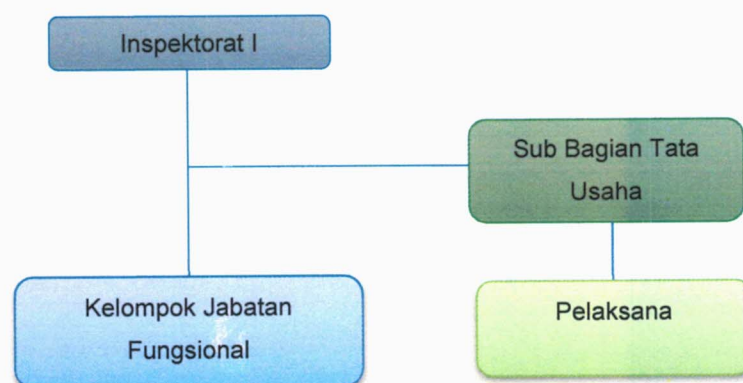
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak

lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan pelaksana

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Sumber Daya Manusia pada Inspektorat I berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan detail sebagai berikut:

- a. Auditor Utama : 1 Orang;
- b. Auditor Madya : 4 Orang;
- c. Auditor Muda : 6 Orang;
- d. Auditor Pertama : 6 Orang;
- e. Auditor Terampil : 1 Orang;
- f. Arsiparis Terampil : 1 Orang;
- g. Kasubag TU : 1 Orang.



Gambar 1. 2 Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta

penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha

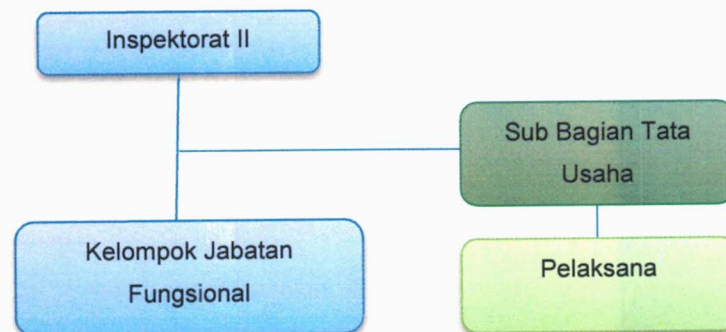
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat II berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 4 Orang;
- c) Auditor Muda : 6 Orang;
- d) Auditor Pertama : 3 Orang;
- e) Auditor Terampil : 3 orang;
- f) Kasubag TU : -
- g) Pelaksana : 1 orang.



Gambar 1. 3 Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jendral, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

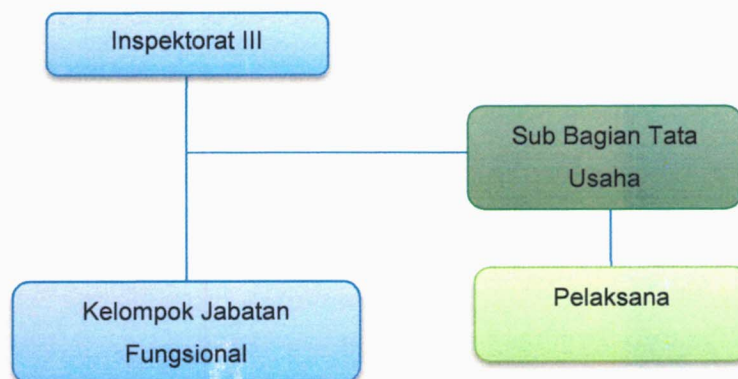
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urus rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat III berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 4 Orang;
- c) Auditor Muda : 6 Orang;
- d) Auditor Pertama : 3 Orang;
- e) Auditor Terampil : 2 Orang;
- f) Kasubag TU : -
- g) Pelaksana : 1 orang.



Gambar 1. 4 Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal IndustriAgro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Inspektorat IV terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

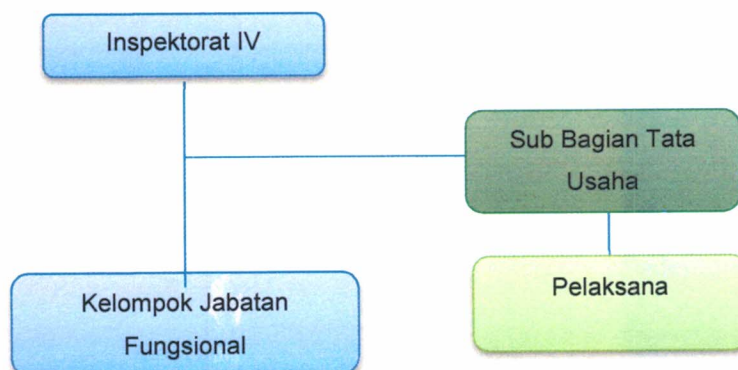
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat IV berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Madya : 4 Orang;
- b) Auditor Muda : 7 Orang;
- c) Auditor Pertama : 5 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 orang;
- e) Pelaksana : 1 orang.



Gambar 1. 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV

5) Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
- b. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat;
- f. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;
- h. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus menteri dan/atau inspektur jenderal;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada inspektorat investigasi; dan;
- j. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja inspektorat investigasi.

Inspektorat Investigasi terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Investigasi berjumlah 11 (sebelas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Madya : 2 Orang;
- b) Auditor Muda : 3 Orang;
- c) Auditor Pertama : 4 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 Orang;
- e) Outsourcing : 1 Orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Dukungan Manajemen", dengan Visi dan Misi sejalan dengan Visi, Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi

1. Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis SDA dan pengembangan Industri prioritas;
2. Menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. Mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. Mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan;
5. Meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

3. Tujuan

"Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian".

Program Dukungan Manajemen pada Inspektorat Jenderal Tahun 2026 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp42.005.662.000 dengan program dan kegiatan pada Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal

No	Program	Kegiatan	Output
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Reviu - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Layanan - 194 Laporan - 1 Layanan - 1 Layanan - 38 Laporan - 38 Laporan - 12 Laporan

No	Program	Kegiatan	Output
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Reviu - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Layanan - 4 Laporan - 1 Layanan - 1 Layanan - 16 Laporan - 12 Laporan - 1 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Reviu - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Dokumen - 1 Layanan - 10 Laporan - 1 Layanan - 1 Layanan - 57 Laporan - 27 Laporan - 28 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Reviu - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Layanan - 1 Layanan - 6 Laporan - 1 Layanan - 1 Layanan - 4 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan
5	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal	- 1 Layanan - 1 Layanan - 4 Laporan

No	Program	Kegiatan	Output
		- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Layanan - 1 Layanan - 3 Laporan - 1 Laporan - 2 Laporan
6	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	- Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Teknologi - Layanan Protokoler - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan - Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	- 31 Unit - 193 Unit - 1 Layanan - 1 Layanan - 12 Layanan - 5 Paket - 137 Orang - 1 Layanan - 1 Layanan - 1 Layanan - 10 Laporan - 1 Layanan

*Sumber: Data POK Revisi 4 Tahun 2026

2.2 Sasaran Program Tahun Anggaran 2026

Adapun Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2026 yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Level kapabilitas (IACM) APIP Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> dan penilaian dari BPKP	Nilai	3,3

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam Sasaran Program dan Indikator Kinerjanya yang diukur melalui Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU	0,45 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,45% total anggaran Kementerian Perindustrian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		1.2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *) IKU	62%	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah Sesuai Rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran T-1 dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran T-1 C = Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun T-2 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun T-2
		1.3 Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *) IKU	20%	Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK dan WBM dibagi dengan total satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBM dikali 100%
		1.4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi tim auditor Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		1.5 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,4	IP ASN dihitung oleh tim kepegawaian masing-masing unit sesuai Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019
		1.6 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	73	Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian
		1.7 Tingkat Penerapan SPBE	78%	Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri LKE Tingkat Penerapan SPBE
		1.8 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,4	Nilai IKPA disusun atas 13 indikator (program dan keuangan). Nilai didapatkan dari aplikasi SAKTI yang diterbitkan tiap bulan
		1.9 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	79%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran
		1.10 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91,3%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)=Keterangan:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521111, 521211, 521219, 521811, 522111, 522131, 522141, 522162, 522191, 524114, 524119, 525112, 525113, 525115, 526112, 532111.
		1.11 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	86,25	Penilaian dilakukan oleh Biro Keuangan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif	1.12 Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	96%	$\frac{((\text{Pegawai yang melaporkan SPT/Aparatur Negara tidak wakib LHKPN}) \times 100\%) + ((\text{Pegawai yang melaporkan LHKPN/Aparatur negara wajib LHKPN}) \times 100\%)}{2}$
		1.13 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	62%	Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk (SP4N-LAPOR!)
		1.14 Persentase Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25%	(Temuan yang ditindaklanjuti/Jumlah temuan) x 100% Penugasan khusus terdiri dari Audit Investigatif, ADTT, dan penugasan khusus lainnya

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Hasil yang Telah Dicapai

Pada akhir tahun 2025 yaitu tanggal 30 Desember 2025 terbit revisi-1 dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 Tanggal 8 Desember 2025 Hal Tindak Lanjut Atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 Tanggal 31 Oktober 2025. Kemudian, Revisi ke-2 juga terbit pada tanggal 30 Desember 2025. Revisi tersebut merupakan Revisi wewenang KPA dalam rangka penyesuaian kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai PPPK, serta perjalanan dinas luar negeri pimpinan. Sedangkan, Revisi ke-3 terbit pada tanggal 13 Februari 2026. Revisi DIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian keluaran (Output) pasca Revisi Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden. Revisi ke-4 terbit pada tanggal 5 Maret 2026. Revisi DIPA ke Kanwil DJPB dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan honorarium tim kerja dan belanja operasional gaji pramubakti, serta operasional lainnya.

Kegiatan Inspektorat Jenderal pada triwulan I ini merupakan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan sebelumnya. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan triwulan I Tahun 2026 (Januari-Maret) mencapai Rp12.602.775.092,- atau 30,00% dari total pagu anggaran sebesar Rp42.005.662.000,- (berdasarkan data MyIntress Kemenkeu Per 31 Maret 2026).

Realisasi pagu anggaran yang tercantum dalam Laporan Ketersediaan Dana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pagu Efektif

Unit Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Dana Tersedia (Efektif)	
		Keuangan (Rp.)	%	J u m l a h (Rp)	%
Inspektorat I	689.375.000	332.168.571	48,18	357.206.429	51,82
Inspektorat II	720.661.000	265.824.428	36,89	454.836.572	63,11
Inspektorat III	706.976.000	369.672.918	52,29	337.303.082	47,71
Inspektorat IV	759.721.000	182.349.978	24,00	577.371.022	76,00
Sekretariat Inspektorat Jenderal	38.273.431.000	11.502.086.671	30,05	26.771.344.329	69,95
Inspektorat Investigasi	696.498.000	92.532.506	13,29	603.965.494	86,71
Total	41.846.662.000	12.744.635.072	30,46	29.102.026.928	69,54

Sedangkan realisasi anggaran per unit kerja dan realisasi per jenis belanja anggaran di Inspektorat Jenderal Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Inspektorat Jenderal

Unit Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia (Efektif)	
		Keuangan (Rp.)				J u m l a h (Rp)	
Inspektorat I	689.375.000	332.168.571	48,18	0	0	357.206.429	51,82
Inspektorat II	720.661.000	265.824.428	36,89	0	0	454.836.572	63,11
Inspektorat III	706.976.000	366.154.918	51,79	0	0	340.821.082	48,21
Inspektorat IV	759.721.000	140.578.488	18,50	0	0	619.142.512	81,50
Sekretariat Inspektorat Jenderal	38.432.431.000	11.416.916.181	29,71	0	0	27.015.514.819	70,29
Inspektorat Investigasi	696.498.000	81.132.506	11,65	0	0	615.365.494	88,35
Total	42.005.662.000	12.602.775.092	30,00	0	0	29.402.886.908	70,00

Tabel 3. 3 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	23.332.269.000	7.110.620.081	0	0	16.221.648.919
2	52 Belanja Barang	16.963.893.000	4.530.207.921	0	0	12.433.685.079
3	53 Belanja Modal	1.709.500.000	961.947.090	0	0	747.552.910
Jumlah		42.005.662.000	12.602.775.092	0	0	1.173.676.976
Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto						
Sumber Data: Myintress per 31 Maret 2026						

3.2 Analisa Capaian Kinerja

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Output Inspektorat Jenderal Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	31 Unit	31 Unit	35 Unit	-	-	-	-	-	-
2	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	193 Unit	48 Unit	14 Unit	48 Unit	-	48 Unit	-	49 Unit	-
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	4 Layanan	-	3 Layanan	-	5 Layanan	-
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-
5	Layanan Manajemen SDM Internal	137 Orang	35 Orang	5 Orang	34 Orang	-	34 Orang	-	34 Orang	-
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal Set Itjen	13 Dokumen	4 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-
7	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1 Paket	-	-	-	-	-	-	1 Paket	-
8	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat I	105 Dokumen & Laporan	27 Dokumen & Laporan	12 Dokumen & Laporan	26 Dokumen & Laporan	-	26 Dokumen & Laporan	-	26 Dokumen & Laporan	-
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat II	36 Dokumen & Laporan	9 Dokumen & Laporan	-	9 Dokumen & Laporan	-	9 Dokumen & Laporan	-	9 Dokumen & Laporan	-
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat III	126 Dokumen & Laporan	32 Dokumen & Laporan	56 Dokumen & Laporan	32 Dokumen & Laporan	-	31 Dokumen & Laporan	-	31 Dokumen & Laporan	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
11	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat IV	16 Dokumen & Laporan	4 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	4 Dokumen & Laporan	-	4 Dokumen & Laporan	-	4 Dokumen & Laporan	-
12	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat Investigasi	13 Dokumen & Laporan	4 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	3 Dokumen & Laporan	-	3 Dokumen & Laporan	-	3 Dokumen & Laporan	-

*) Berdasarkan data Capaian Output

Adanya Perbedaan realisasi dengan target disebabkan karena:

1. Relaksasi anggaran sehingga terdapat dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan
2. Terdapat perubahan rencana kegiatan

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW I
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,45	Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada triwulan ini adalah sebagai berikut: - Follow Up permintaan dokumen pemeriksaan BPK; - Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjutnya - Koordinasi ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara); - tindak lanjut saldo dekon dan pemutakhirannya;

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW I
				- Pre Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 oleh BPK-RI; - Hasil penilaian Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester II Tahun 2026.
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU	62	- Penyusunan laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025; - Koordinasi Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2025; - Pemutakhiran Capaian Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal; - Persiapan Evaluasi AKIP Tingkat Unit Kerja Eselon I Tahun 2026.
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *) IKU	20	- Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal Zona integritas Tahun 2026; - Penyampaian Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2025 oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB kepada satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBBM Tahun 2025.
		Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Koordinasi Penilaian SAKIP Eselon I. sampai dengan Akhir Triwulan I 2026, masih dilakukan entry meeting penilaian SAKIP Eselon I kementerian perindustrian.
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,4	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2026.
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	73	Nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian Perindustrian diselenggarakan di Triwulan III. Kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan I adalah Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Inspektorat Jenderal, penataan arsip dan pemindahan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW I
				arsip aktif dan arsip personal file dari ruangan TU ke ruangan central file.
		Tingkat Penerapan SPBE	78	Tingkat penerapan SPBE diselenggarakan di Triwulan III.
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	93,4	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal belum diperoleh nilainya sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan belum semua Unit Kerja di Ijtjen belum mengisi Capaian Output.
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	79	Pelaksanaan Survey Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal akan diselenggarakan di Triwulan IV. Capaian kinerja yang dilakukan adalah Pengadaan Sarana Penunjang kegiatan perkantoran berupa kursi kerja sebanyak 12 unit, penyewaan barang operasional.
		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal	91,3	Pada Triwulan I capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Ijtjen sebesar 50,17%. Kegiatan yang dilakukan di Triwulan I meliputi Pengadaan Sarana Penunjang kegiatan perkantoran berupa kursi kerja, Pengadaan Sarana Penunjang kegiatan perkantoran berupa kitchen set, Pengadaan Furniture Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Lemari Credenza, Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Lemari Dokumen.
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	86,25	Hasil Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan akan keluar di Triwulan IV. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu penyusunan Laporan Keuangan dan BMN TA 2025 Unaudited
	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	96	Hasil pegawai di lingkungan Kemenperin yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) belum dapat dihitung. Kegiatan yang dilakukan di Triwulan I adalah monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai wajib lapor

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW I
				LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN dan monitoring serta menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan.
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	62	Laporan yang masuk sebanyak 11 laporan. 6 diantaranya dalam proses, telah selesai sebanyak 3 laporan, dan 2 laporan belum ditindaklanjuti. sehingga capaian penyelesaian pengaduan per 1 April 2026 sebesar 81,8%.
		Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25	Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian, melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal, melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi dan melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2026 terdapat beberapa hal perbedaan dalam indikator kinerja dibandingkan dengan tahun 2025. Beberapa Indikator mengalami perubahan dan terdapat penambahan indikator baru. Perjanjian Kinerja tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi TW I	Keterangan
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU)	0,45%	Belum dapat diukur	
		2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)	62%	Capaian per 2 April 2026 sebesar 6,16%	
		3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)	20%	Kegiatan pendukung indikator ini masih dalam proses pelaksanaan	
		4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Penilaian SAKIP Eselon I masih dalam proses Pelaksanaan	
		5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Nilai 81,4	Realisasi diperoleh di Triwulan IV	
		6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai 73	Belum dapat diukur	

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi TW I	Keterangan
			Inspektorat Jenderal			
		7	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Nilai 78	Belum dapat diukur	
		8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai 93,4	Belum dapat diukur	
		9	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	79%	Survey dukungan manajemen akan dilaksanakan di Triwulan IV	
		10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	91,3%	Capaian per 31 Maret sebesar 50,17%	
		11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai 86,25	Belum dapat diukur	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif	12	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta	96%	Dalam tahap pelaporan	

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi TW I	Keterangan
			Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)			
		13	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	62%	Capaian Triwulan I sebesar 81,8%	
		14	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25%		

*Keterangan :



= Masih dalam tahap proses



= Target telah tercapai



= Tidak mencapai target

Kegiatan pada triwulan I yang telah dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2026 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan

- Menghadiri undangan Pelaksanaan *Kick Off* Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
- Rapat Internal Terbatas dengan Agenda Pembahasan Penempatan Pejabat Hasil Lelang;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut Surat dari Kemenko Politik dan Keamanan, Perihal Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan dan Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri;
- Menghadiri undangan Pelantikan Pejabat Tinggi di Lingkungan Kemenperin;
- Menghadiri undangan Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di Lingkungan Kemenperin;
- Rapat Internal Terbatas dengan Menperin;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan RPermenperin tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (Tindakanlanjutan Disposisi Menperin terkait Surat dari Mensesneg);
- Rapat Internal Itjen dengan Agenda Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2026;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan RUU Kawasan Industri;
- Menghadiri undangan Pelantikan Dewan Pengurus Harian Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Periode 2025-2029;
- Menghadiri undangan sebagai Narasumber Rapat Kerja BPSDMI Tahun 2026;
- Menghadiri undangan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI - Menteri Perindustrian;
- Mendampingi Menperin dengan Agenda Pertemuan dengan Mr. Bobur Alimov, ADB *Country Director for Indonesia*;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Lanjutan Pengembangan Inhan dengan topik Peran IMC sebagai Integrator pengembangan Inhan Nasional;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan *Carbon Capture* dan *World Bank*.
- Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 oleh Presiden Republik Indonesia;
- Menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus ASAKI Periode 2026-2029;
- Rapat Internal Terbatas dengan Menperin dengan Agenda Lanjutan Pembahasan RUU Kawasan Industri;
- Rapat Internal Terbatas dengan Menperin untuk Agenda Pembahasan Tindak Lanjut dan Pembahasan Skema Kerjasama dengan *World Bank* dan Regulasi Transformasi Industri Hijau;

- Rapat Internal Terbatas dengan Menperin untuk Agenda Pembahasan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Program Prioritas Presiden TA 2026 (Tindaklanjut Surat dari Mensesneg);
- Mendampingi Menperin dengan Agenda *Entry Meeting* Pemeriksaan atas LK Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- Rapat Persiapan Agenda Menperin dengan Metro TV;
- Menghadiri Pelantikan Para Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Penyelesaian Peraturan Pelaksanaan Tata Cara TKDN yang Baru;
- Mewakili Menperin Membuka Bazar Ramadhan DWP Tahun 2026;
- Pertemuan Internal Terbatas dengan Menperin;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Hasil Negosiasi Tarif Resiprokal RI-AS dan Keputusan *US Supreme Court*;
- Rapat Internal Terbatas Bersama Menperin dengan Agenda Lanjutan Pembahasan RUU Kawasan Industri;
- Rapat Internal Terbatas Bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Rencana Pembentukan UPT Pembiayaan Industri;
- Mewakili Menperin Membuka Bazar Lebaran Tahun 2026;
- Mendampingi Menperin dengan Agenda: Pertemuan dengan Forum Wartawan Industri;
- Acara Buka Bersama Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
- Rapat Internal Terbatas Bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Perkembangan IDCf dan GISCO;
- Halal Bihalal Kementerian Perindustrian;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan terkait Persiapan Indonesia *Partner Country* INNOPROM 2026.

1.2 Kegiatan Pengawasan

• Inspektorat I

- Layanan Konsultasi dan Pengawasan di Wisma Industri;
- Penyusunan Program Kerja dan SKP;
- Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I;
- Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;

- Rapat Evaluasi Kegiatan Pengawasan TA 2024 dan Rencana Pengawasan 2026;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan /BMN pada BDI Padang, BDI Medan, PTKI Medan, AKA Bogor, STTT Bandung, dan Petrokimia Banten;
 - Reviu Dokumen Data Dukung Revisi Target PNBPN dan Pagu Penggunaan PNBPN serta Penyelesaian Tunggakan Belanja pada BPSDMI;
 - Reviu Dokumen Data Dukung Revisi Operasional Kementerian Perindustrian dan Belanja Modal Satuan Kerja pada BPSDMI;
 - Reviu Usulan Revisi DIPA TA 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - Melaksanakan Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan /BMN pada Politeknik APP Jakarta, Politeknik STMI Jakarta, dan BDI Jakarta;
 - Melaksanakan Evaluasi SAKIP pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal.
- **Inspektorat II**
 - Administrasi dan Pelaksanaan Konfirmasi temuan Audit Kepatuhan dan Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika TA 2024;
 - Menghadiri Forum Kolaborasi SPBE Kementerian Perindustrian;
 - Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Ditjen ILMATE TA 2026;
 - Penyusunan PP 39 Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2025;
 - Administrasi dan Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang Dan Jasa pada Direktorat Jenderal IKMA Dan Direktorat Jenderal ILMATE TA 2025;
 - Reviu LKBMN dan PIPK pada Direktorat Jenderal IKMA, Direktorat Jenderal ILMATE, Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK), Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) TA 2025;
 - Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) dan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) TA 2025;
 - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat II TA 2025;
 - Reviu atas Usulan Revisi Anggaran terkait Penyesuaian Target RO terkait Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 serta Pemenuhan Kekurangan Anggaran Operasional Kementerian Perindustrian;
 - Konfirmasi Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Jenderal IKMA dan ILMATE TA 2025;
 - Reviu Revisi DIPA Ditjen IKMA TA 2026;
 - Konsultasi terkait Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan *Marketplace* umum (Non-Pemerintah) di Ditjen ILMATE;
 - Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Unit Eselon II Direktorat Jenderal ILMATE dan

Direktorat Jenderal IKMA serta UPT Direktorat Jenderal IKMA TA 2025.

• **Inspektorat III**

- Audit Kinerja Triwulan 4 TA 2025 pada BSKJI;
- Membantu Pelaksanaan Audit Kinerja Triwulan 4 TA 2025 pada BSKJI;
- Mendampingi Pimpinan dalam Forum Kolaborasi BSKJI Tahun 2026;
- Rapat Pembahasan Standar Biaya;
- Melaksanakan Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) Bandung TA 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) Bandung TA 2025;
- Membantu pelaksanaan Administrasi Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Bandung TA 2025
- Reviu Revisi RKAKL TA 2026 pada BSKJI;
- Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada satker di lingkungan BSKJI dan unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal (ITJEN).

d. Inspektorat IV

- Pelaksanaan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis Cakupan Tugas;
- Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi MRPN;
- Koordinasi Pengawasan Internal/Eksternal Inspektorat IV;
- Pelaksanaan Reviu PIPK Tahun 2025;
- Pelaksanaan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis Cakupan Tugas;
- Pelaksanaan Kegiatan Reviu LKBMN Tahun 2025;
- Pelaksanaan Kegiatan Survey Pendahuluan Audit Kinerja pada Ditjen IKFT TA 2025;
- Undangan Rapat Kerja IKFT.

e. Inspektorat Investigasi

- Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Penanganan Laporan Pengaduan SPAN LAPORI;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terkait Penerimaan Mahasiswa pada Poltek Industri Petrokimia Banten;

32

- Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Pekerjaan *Business Matching* Produk Dalam Negeri Tahun 2024;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat pada BBSPJIKFK;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu pada kegiatan AIGIS 2025;
- Pemeriksaan Disiplin 5 (lima) pegawai;
- Menghadiri Rapat Forum Kolaborasi SPBE;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Menghadiri Rapat Tindak Lanjut BPK;
- Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Investigasi TW IV 2025 dan Tahun 2025;
- Menghadiri Rapat Kebijakan Pengawasan Itjen Tahun 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Mekanisme Perijinan Berusaha;
- Menghadiri Rapat Penyusunan Draft Kepmen tentang SBM Transportasi Darat;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Draft Permenperin K2 Industri;
- Menghadiri *Entry Meeting* Pemeriksaan BPK;
- Penyusunan Rencana Aksi dan Perkin Tahun 2026;
- Penyusunan dokumen Akuntabilitas Inspektorat Investigasi;
- Revisi Anggaran Inspektorat Investigasi TA 2026;
- Menghadiri Rapat *Kick-off* DIPA;
- Sosialisasi SOP Hukuman Disiplin;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan terkait Konsultansi;
- Pemeriksaan Disiplin 4 (empat) Pegawai;
- Tindak Lanjut Hasil ADTT pada Politeknik STTT dan BBSPJILM;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Draft Pedoman Audit Investigasi;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Sektor Industri Tahun 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Nota Keberatan FS;
- ADTT Pekerjaan BM PDN Tahun 2024;
- Telaah dan Tindak Lanjut atas Laporan Disiplin 1 (satu) Pegawai;
- Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Investigasi;
- ADTT dalam rangka Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat pada BBSPJIKFK;
- Menghadiri Rapat *Kick off* Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pengajuan Perizinan Berusaha PT KCI;
- Audit dengan Tujuan Tertentu Pekerjaan *Business Matching* Produk Dalam Negeri Tahun 2024;
- Pemeriksaan Disiplin Pegawai Pada BPSDMI (Panggilan II);

- Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
- Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Sekretariat Jenderal.

1.3 Kegiatan Dukungan Pengawasan

- a. Penyusunan laporan yang diselesaikan di Triwulan I Tahun 2026 adalah Laporan Kinerja Eselon I dan II Inspektorat Jenderal Tahun 2025, Laporan PP39 Triwulan I Tahun 2026 Unit Eselon I dan II Inspektorat Jenderal, Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Eselon I dan II Inspektorat Jenderal Tahun 2026, Laporan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal bulan Januari, Februari, dan Maret.
- b. Pengembangan SDM
Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan I (Januari - Maret) adalah sebagai berikut:
 - i. Pendaftaran Peserta Pelatihan Auditor Ahli Pertama APIP Kementerian/Lembaga (Ciawi) CPNS JF Auditor Ahli Pertama dan Terampil di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - ii. Pendaftaran JF APK APBN Periode I Tahun 2026 a.n. Farha Maulidia dan Muhamad Luthfi;
 - iii. Pendaftaran Peserta Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda a.n. Zuan Andri Wijayanto;
 - iv. Manajemen Pensiun Auditor Ahli Madya a.n. Ali Joto Manalu;
 - v. Pendaftaran Uji Kompetensi Arsiparis Ahli Pertama a.n. Andy Sebastian Tanasha;
 - vi. Pembuatan ND Permohonan Konfirmasi Kenaikan Gaji Berkala a.n. Dewi Setiawati;
 - vii. Pembuatan Pakta Integritas Inspektorat Jenderal Tahun 2026;
 - viii. Pembuatan ST Plt. Inspektur Jenderal dan Plt. Inspektur Investigasi, ST Penugasan Auditor Ahli Utama Inspektorat Investigasi dan Inspektorat IV;
 - ix. Penetapan Angka Kredit Tahun 2025 Inspektorat Jenderal;
 - x. Manajemen Hukuman Disiplin a.n. Azka Rianto Tedja Ningrat;
 - xi. Kenaikan Gaji Berkala Periode Januari, Februari, Maret 2026;
 - xii. Peremajaan Data Seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal Tahun 2026 di Intranew Kemenperin;
 - xiii. Pendaftaran BPJS Kesehatan a.n. Novi Fitriyanti dan Yazid Abdurrohman Aunillah;

- xiv. Pembuatan SK Tim Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2026 ke Biro OSDM Kemenperin;
- xv. Menghadiri Undangan Biro Umum Kemenperin terkait Rapat Koordinasi Pengelolaan Presensi Tenaga Kearsipan Record Center Rawa Domba;
- xvi. Pengurusan Administrasi Perpindahan Pegawai ke LEMHANAS a.n. Diki Budiman;
- xvii. Mengirim tanggapan atas simpulan sementara atas evaluasi kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian Tahun 2026 ke Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP;
- xviii. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dari Januari s.d. Desember 2026;
- xix. Mengawas Ujian Penjenjangan Auditor Ahli Muda dan Madya secara daring di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Penerbitan Surat Keputusan/ SK:

- SK Nomor 30 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - SK Nomor 31 Tahun 2026 Tentang Tim Peningkatan Kinerja Kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal ;
 - SK Nomor 32 Tahun 2026 tentang Tim Peningkatan Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - SK Nomor 33 Tahun 2026 tentang Tim Penggerak Budaya Kerja ASN BerAKHLAK di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - SK Nomor 34 Tahun 2026 tentang Tim Pencegahan Korupsi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - SK Nomor 35 Tahun 2026 tentang Tim Protokoler.
- c. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
- Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan BPK-RI;
 - Menyusun laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025;
 - Menyusun laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI;

- Menyusun laporan analisis temuan material pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025;
- Menyiapkan materi pimpinan dalam rangka Kick Off Pelaksanaan DIPA Tahun 2026;
- Menyiapkan data capaian kinerja "Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Satker" untuk seluruh Satker di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Menyiapkan data capaian kinerja "Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal" Lingkup Eselon I dan II Inspektorat Jenderal;
- Penyampaian data capaian kinerja kepada seluruh stakeholder;
- Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Periode Semester II Tahun 2025;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Ditjen KPAII Tahun 2025;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Evaluasi dan Laporan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional;
- Menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- Pemenuhan dan Penyampaian data dan dokumen pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepada BPK-RI melalui SIPTL;
- Menyiapkan Data Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Perindustrian;
- Mengkoordinasikan Tanggapan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Notisi Hasil Evaluasi Penguatan Industri dan Percepatan Hilirisasi Industri pada Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- Menyiapkan Data Hasil Pengawasan APIP yang Berpotensi Mempengaruhi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 oleh BPKP;
- Menyiapkan Data Permintaan Dokumen Pemeriksaan Terinci Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025;
- Pemutakhiran Capaian Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal;

- Melakukan identifikasi data temuan personal, mencari informasi kepada pihak-pihak terkait, dan menerbitkan surat bebas temuan salah satu pegawai Kementerian Perindustrian;
 - Menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Ketahanan dan Perwilayahan Industri;
 - Mengkoordinasikan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
 - Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit pada Pusdatin;
 - Menghadiri Audiensi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka Studi Banding dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI;
 - Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Temuan Sesditjen KPAIL, Atase Perindustrian di Brussel, dan Atase Perindustrian di Tokyo;
 - Menyiapkan Dokumen Penetapan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Audit) Internal pada 9 Unit Kerja Eselon I dan 3 Unit Pusat;
 - Membuat tanggapan atas simpulan sementara atas evaluasi kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
 - Menghadiri Pembahasan Simpulan Sementara atas Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
 - Menyelenggarakan Rapat Persiapan Evaluasi AKIP Tingkat Unit Kerja Eselon I Tahun 2026;
 - Menyelenggarakan *Entry Meeting* Evaluasi AKIP Tingkat Unit Kerja Eselon I Tahun 2026.
- d. Pengawasan dan Analisa Pengawasan
- Menyusun Laporan APIP Tahun 2025;
 - Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan APIP Tahun 2025;
 - Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Triwulan IV Tahun 2025;
 - Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi RB Triwulan IV Tahun 2025 pada portalrb;
 - Mengikuti rapat evaluasi capaian tahun 2025 dan rencana pelaksanaan penilaian kinerja penyedia tahun 2026;
 - Melakukan pengisian laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan pada portalrb;
 - Mengikuti Rapat Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2026;

- Mengikuti FGD dan *Workshop* Pengendalian Risiko Ketidakpastian dan Distorsi Informasi Proses Industri untuk Optimalisasi Penerimaan Negara;
 - Melaksanakan Rapat koordinasi pelaksanaan Aksi 8 Optimalisasi Penerimaan Negara (Pajak dan non-Pajak);
 - Melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan I Tahun 2026 (Periode B15);
 - Mengikuti Gratifikasi *Talks*: Perubahan Peraturan Pelaporan Gratifikasi dalam Per. KPK Nomor 1 Tahun 2026;
 - Mengikuti *Entry Meeting* Evaluasi IACM;
 - Mengikuti SAKIP dan ZI Award 2025;
 - Mengikuti Rapat Finalisasi Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
 - Mengikuti Wawancara dalam Rangka Evaluasi Kapabilitas APIP Kemenperin;
 - Menyusun konsep surat permintaan tim pengawasan tahun 2026;
 - Menyusun Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Perubahan Pertama Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2026;
 - Menyusun Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal Zona integritas Tahun 2026;
 - Pemantauan capaian progres pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi periode B15 dan penyampaian laporannya melalui jaga.id;
 - Penyampaian Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2025 oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB kepada satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBBM Tahun 2025;
 - Penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Tahun 2026;
 - Mengikuti Rapat Paparan Hasil ITSA Modul SIPROSATU pada SIINas.
- e. Penyelesaian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I 2026, yaitu:
- Menghadiri Rapat Lanjutan Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian dan Sekretariat Jenderal Tahun 2026;
 - Penyusunan Laporan PP39 Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - Menghadiri Rapat Sosialisasi Sistem *Prepopulated dan Review Baseline*;
 - Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal;

- Menghadiri Rapat Lanjutan Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian dan Sekretariat Jenderal Tahun 2026;
- Penyusunan Angka Dasar Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2027, dengan total anggaran sebesar 53 miliar;
- Revisi DIPA ke-2 wewenang KPA terkait gaji pegawai P3K dan Pegawai PPNN;
- Persiapan Revisi DIPA ke-3 wewenang DJA terkait revisi Keluaran (Output) yang terdampak dari revisi anggaran pemenuhan Prioritas Direktif Presiden;
- Penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025;
- Penyusunan Target Capaian Output Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kementerian Perindustrian;
- Penyusunan PKPT TA 2026;
- Mengikuti Rapat IKP dan IKSS Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri undangan Rilis IKI Bulan Februari 2026;
- Rapat peta risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2026;
- Pengisian SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Finalisasi Renstra Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Pengisian IKP Sakti Kemenkeu;
- Revisi DIPA ke Kanwil DJPB dalam rangka pemenuhan kebutuhan honorarium tim kerja dan belanja operasional gaji pramubakti, serta operasional lainnya;
- Persiapan revisi DIPA ke DJA dalam rangka buka blokir kendaraan dinas pejabat eselon II sebanyak 1 unit.

f. Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026

Tabel 3. 7 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I Tahun 2026

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Tanggal Kontrak	Tanggal BAST	Tanggal SP2D
1	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa Printer Inspektorat Jenderal	Rp 352,447,200	CV. Mauza Putra Berlian	29-Dec-2025	2-Jan-26	21-Jan-26
2	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 131,998,980	PT. Bumi Jasa Utama	30-Dec-2025	2-Jan-26	22-Jan-26
3	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa Mesin Fotokopi	Rp 184,663,152	PT. Darmo Atmojo Bersaudara	31-Dec-2025	2-Jan-26	23-Jan-26
4	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa laptop <i>high end</i>	Rp 29,304,000	PT. Sinergi Pro Kreasi	31-Dec-2025	2-Jan-26	22-Jan-26
5	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Inspektorat Jenderal	Rp 172,549,997	PT. Adi Sarana Armada Tbk.	31-Dec-2025	2-Jan-26	26-Jan-26

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Tanggal Kontrak	Tanggal BAST	Tanggal SP2D
6	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa Kamera <i>Mirrorless</i> dan Perlengkapan kamera	Rp 70,302,960	PT. Asah Sumber Rezeki	31-Dec-2025	2-Jan-26	22-Jan-26
7	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa Webcam	Rp 22,244,400	PT. Asah Sumber Rezeki	31-Dec-2025	2-Jan-26	23-Jan-26
8	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Inspektur Jenderal	Rp 194,259,989	PT. BRI Multifinance Indonesia	13-Jan-26	30-Jan-26	3-Feb-26
9	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Kendaraan Dinas dan Operasional Inspektorat Jenderal	Rp 1,249,979,880	PT. Adi Sarana Armada Tbk.	26-Jan-2026	2-Feb-2026	-
10	EBA.994.002.B.521119	Pengadaan Sewa Tanaman Hias	Rp 150,828,000	PT. Sasmitra Karya Mandiri	17-Dec-2025	2-Jan-26	29-Jan-26

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Tanggal Kontrak	Tanggal BAST	Tanggal SP2D
11	EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Sarana Penunjang kegiatan perkantoran berupa kursi kerja	Rp 18,354,960	PT. Tunas Indo Sejahtera	3-Feb-26	9-Feb-26	23-Feb-26
12	EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Sarana Penunjang kegiatan perkantoran berupa kursi kerja pegawai	Rp 63,999,270	PT. Hema Medhajaya	27-Feb-26	6-Mar-26	-
13	EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Sarana Penunjang kegiatan perkantoran berupa kitchen set	Rp 139,367,160	CV. JIA INDOTAMA PERKASA	27-Feb-26	9-Mar-26	-
14	CAN.001.051.A.532111	Pengadaan Perangkat TIK penunjang kegiatan perkantoran berupa Laptop dan Komputer Tablet	Rp 740,225,700	PT. Sinergi Solusi Sekawan	9-Mar-26	17-Mar-26	-
15	EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture Penunjang Kegiatan	Rp 31,994,640	CV. Tujuh Samudra	2-Mar-26	12-Mar-26	-

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Tanggal Kontrak	Tanggal BAST	Tanggal SP2D
		Perkantoran berupa Lemari Credenza					
16	EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Lemari Dokumen	Rp 17,595,720	CV. Tujuh Samudra	2-Mar-26	12-Mar-26	-
Total		Rp 3,570,116,008					

3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tidak mengalami hambatan yang berarti. Namun, ada beberapa kendala yang dialami, yaitu:

- 1) Revisi anggaran yang terjadi beberapa kali;
- 2) Penyelesaian rekomendasi hasil tindak lanjut pengawasan internal yang masih perlu dioptimalkan mengingat di Triwulan I realisasi masih rendah dan di Triwulan IV Tahun 2025, Indikator ini tidak mencapai target;

2.4 Langkah Tindak Lanjut

- a. Telah diserahkan segala dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses revisi kepada pihak DJA;
- b. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar realisasi dapat tercapai 60% pada Triwulan II;
- c. Menyelesaikan Saldo temuan Itjen segera sesuai rekomendasi yang dijelaskan;
- d. Draft Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengawasan Tahun 2026 saat ini telah selesai direviu oleh Biro Hukum dan ditahap pengesahan;
- e. Draft Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Inspektorat Jenderal masih dalam tahap finalisasi dan telah direviu oleh Biro Hukum;
- f. Masing-masing unit agar mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan baik dan bertanggungjawab.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan I Tahun 2026 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 (Januari – Maret) mencapai Rp12.602.775.092,- atau sebesar 30% dari total pagu anggaran sebesar Rp42.005.662.000,-. Sisa anggaran sampai dengan Desember 2026 sebesar Rp29.402.886.908,- (berdasarkan MyIntress Kemenkeu Per 31 Maret 2026).

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum seluruhnya dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Diharapkan Informasi capaian kinerja Triwulan I dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2026 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN